

**Bukti Penerimaan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi**

1 pesan

Direktorat Jenderal Pajak <no-reply@pajak.go.id>  
Kepada: yurichika13@gmail.com

30 Januari 2026 pukul 13.41



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200 ◆ informasi@pajak.go.id ◆  
pengaduan@pajak.go.id

**BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)**

Nomor BPE : **BPE-11411/CT/KPP.1410/2026**  
Tanggal : 30 Januari 2026  
NPWP : 6472026705980002  
Nama Wajib Pajak : YURI CHIKA DWI PUTRI  
Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi  
Tahun Pajak : 2025  
Masa Pajak : Juni - Desember 2025  
Status SPT : Normal  
Saluran : Portal Wajib Pajak  
Tanggal Terima SPT : 30 Januari 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.

*Terima kasih telah menggunakan layanan digital DJP. SPT Anda telah tercatat dan diterima dengan baik.*

Mohon simpan email ini sebagai arsip pribadi Anda.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL  
INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA  
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSUNANNYA**

NOMOR : 02/1828874

Pembetulan Ke  Pembatalan

**1721 - A2**

MASA PEROLEHAN

0 1 - 1 2

TAHUN PEROLEHAN

2 0 2 5

**A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN**

A.1 NPWP : 6472026705980002  
A.2 NIP/ NRP : 199805272025062012  
A.3 NAMA : YURI CHIKA DWI PUTRI, A.Md.T.  
A.4 PANGKAT/ GOL : III/c / Pengatur  
A.5 NAMA JABATAN : Pelaksana  
A.6 JENIS KELAMIN :  LAKI - LAKI  PEREMPUAN  
A.7 NIK : 6472026705980002  
A.8 STATUS/JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP

TK / 0

**B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21**

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : <input type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02		
<b>PENGHASILAN BRUTO</b>		
1.	GAJI POKOK / PENSIUN	13.921.040
2.	TUNJANGAN ISTRI	0
3.	TUNJANGAN ANAK	0
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	506.940
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	1.260.560
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI GAJI	12.119.232
9.	<b>JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 8)</b>	<b>27.807.772</b>
<b>PENGURANG</b>		
10.	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN	1.390.388
11.	IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT	661.247
12.	ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	<b>JUMLAH PENGURANGAN (10 S.D. 12)</b>	<b>2.051.635</b>
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21</b>		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	25.756.137
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN)	25.756.137
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	54.000.000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)	110.680.000
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PASAL 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19-20-21)	0
23.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	0
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0
24.	PPh PASAL 21 KURANG BAYAR / LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	0
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT C.01  DIPINDAHKAN C.02  PINDAHAN C.03  BARU C.04  PENSIUN

**D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK**

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : 001035195025000  
D.2 Nama Instansi Pemerintah : BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
D.3 ID Sub Unit Organisasi : 663157  
D.4 Tanggal : 3 1 dt 1 2 mm 2 0 2 5 yyyy  
D.5 NAMA PENANDATANGAN : HARMINI  
D.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan Pajak telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik



Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah